

Relasi Kuasa, Modal, dan Politik Lokal: Studi Kasus Masyarakat Nelayan di Desa Bababulo, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat

Zahra Latifah¹⁾, Gustiana A. Kambo²⁾

Universitas Hasanuddin¹⁾²⁾

Correspondence author: zahralatifahh@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Punggawa, Sawi,
Patronage, Social Capital,
Political Mobilization, and
Local Democracy,

How to cite:

Latifah, Zahra, dan Kambo, G.A. 2025. Relasi Kuasa, Modal, dan Politik Lokal: Studi Kasus Masyarakat Nelayan di Desa Bababulo, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Emik, 8(2).

Article info:

Diterima 2025-09-10
Disetujui 2025-10-22
Dipublikasi 2025-12-11

ABSTRACT

The patron-client bond between punggawa (boat owners) and sawi (crew members) in Bababulo's coastal community, Majene Regency, demonstrates how contemporary electoral politics have reconfigured longstanding patterns of exchange and moral obligation. This research underscores a significant shift in the basis of punggawa power, which no longer depends solely on economic assets, but increasingly on the capacity to convert social and symbolic resources such as trust, indebtedness, prestige, and protective roles into political capital that can effectively mobilize votes. Employing a qualitative approach, data was collected through in-depth interviews and participant observation with eleven purposively selected participants, including punggawa, sawi, village authorities, and local political figures. Narrative analysis was applied to uncover processes of meaning-making, power negotiation, and mobilization embedded in everyday interactions. The findings show that the authority of a punggawa is continually reinforced through longstanding moral debts and social trust, which later become political commitments during election periods. Punggawa act as intermediaries who link the fishing community to broader political structures, while sawi are not completely passive; they take advantage of electoral moments to negotiate social and economic gains. The study concludes that traditional patronage persists, but in a transformed form becoming more calculated and transactional while still rooted in moral norms and mutual dependence that have adjusted to the dynamics of modern democratic practice.

1. Pendahuluan

Dinamika kekuasaan dalam masyarakat pesisir Indonesia tidak dapat sepenuhnya dipahami hanya melalui struktur politik formal. Kuasa justru sering kali bersemayam dan dioperasikan melalui figur-firug informal yang memiliki pengaruh besar dalam tatanan sosial-ekonomi komunitas nelayan. Di Sulawesi Barat, khususnya dalam sistem *punggawa-sawi*, *punggawa* adalah penamaan daerah Sulawesi Barat di wilayah pesisir untuk menamai si pemilik kapal, sedangkan *sawi* adalah penamaan daerah untuk nelayan yang bekerja di atas kapal milik *punggawa* atau hubungan yang serupa dengan relasi patron-klien ini telah lama menjadi tulang punggung interaksi sosial ekonomi (Pelras 1996). Relasi patron-klien di komunitas nelayan tradisional tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme ekonomi, tetapi juga dibungkus dengan norma budaya seperti rasa hormat, hutang budi, dan kewajiban moral, yang membantu patron mempertahankan posisi dominan (Mengge 2019). Namun, dalam konteks moderen

dimana demokrasi elektoral dan politik uang semakin mengemuka, relasi tradisional ini mengalami transformasi dan dimobilisasi untuk tujuan-tujuan politik yang lebih kontemporer.

Konsep *punggawa* sebagai patron yang tidak hanya memiliki modal ekonomi, tetapi juga modal sosial dan simbolis dan ini menjadi kunci dalam memahami mekanisme kekuasaan ini. Menurut Bourdieu (1986), modal tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga terwujud dalam bentuk sosial (jaringan, relasi) dan simbolis (prestise, kehormatan). Dalam konteks Bababulo, kekuasaan *punggawa* dibangun melalui sebuah jaringan yang kompleks, dimana hubungan ekonomi berbasis utang-piutang (pinjaman modal, hasil tangkapan) dengan para *sawi*, dikonversi menjadi kewajiban moral dan loyalitas politik. Relasi pertukaran yang tidak setara ini menciptakan ketergantungan yang dalam, sebuah bentuk *clientelism* yang berakar pada patronase ekonomi dan loyalitas sosial, di mana *sawi* merasa berhutang budi dan wajib membala jasa tersebut, termasuk dengan memberikan dukungan politiknya ketika diminta (Scott 1972).

Modernitas dan penetrasi sistem demokrasi elektoral tidak serta merta mengikis praktik patronase tradisional ini. Sebaliknya, dalam banyak kasus, justru dimanfaatkan dan diadaptasi. Logika *one man, one vote* dalam pemilihan umum direduksi menjadi transaksi pertukaran dalam jaringan *punggawa-sawi* yang sudah mapan, sebagaimana diungkapkan oleh Aspinall & Berenschot (2019), bahwa dalam konteks Indonesia secara lebih luas, politik patronase seringkali menjadi mekanisme utama dalam pemilihan kepala daerah. Di Bababulo, *punggawa* bertindak sebagai *vote broker* yang efektif, memobilisasi suara *sawi* dan keluarganya bukan dengan iming-iming uang tunai semata, tetapi dengan mengaktifkan memori kolektif akan hutang budi dan jaminan akan terus menerimanya di masa depan. Proses ini memperlihatkan bagaimana modal sosial dan simbolis dikonversi menjadi modal politik yang sangat nyata (Törnquist 2013).

Namun, kelangsungan relasi *punggawa-sawi* di era moderen bukanlah tanpa gesekan. Komodifikasi politik elektoral yang masif telah mengintensifkan permintaan akan loyalitas yang dapat dikonversi menjadi suara. Situasi ini menempatkan *punggawa* pada posisi yang dilematis: di satu sisi, *punggawa* harus mempertahankan citra sebagai patron yang melindungi dan dipercaya, sebuah modal simbolis yang sangat berharga (Bourdieu, 1986). Di sisi lain, *punggawa* juga terjun ke dalam kontestasi politik yang membutuhkan sumber daya finansial besar untuk memenuhi "kewajiban" yang meluas, bukan hanya kepada nelayan tradisional, tetapi juga kepada jaringan yang lebih luas, seperti tim sukses dan aparat partai politik. Dalam konteks ini, gesekan sering muncul ketika prinsip-prinsip tradisional bertentangan dengan praktik politik elektoral kontemporer. Misalnya, ketika sejumlah *sawi* mulai menuntut "bantuan tambahan" menjelang Pemilu karena mereka melihat kandidat di desa tetangga memberikan dana transportasi yang lebih besar, menciptakan persepsi bahwa *punggawa* tidak lagi mampu bersaing dalam arena politik yang didasarkan pada uang. Dinamika ini menggeser relasi dari sekadar hubungan ekonomi timbal balik yang bersifat personal menuju suatu bentuk *brokered clientelism* yang dimediasi oleh jaringan dan perantara politik, yang lebih impersonal dan transaksional Aspinall & Berenschot (2019).

Dalam konteks ini, *sawi* juga bukan lagi sekadar aktor pasif. Meski terikat dalam hubungan yang tidak setara, mereka memiliki ruang negosiasi tertentu. Kesadaran akan hak politik dan nilai suara mereka dalam demokrasi (meski terbatas) memberikan mereka sedikit daya tawar. Mereka dapat memanfaatkan momen elektoral ini untuk mengamankan akses yang lebih baik terhadap modal, perlindungan dari konflik perairan, atau bantuan-bantuan mendesak, sehingga partisipasi politik mereka dalam mobilisasi ini juga mengandung strategi kelangsungan hidup (*survival strategy*) yang rasional (Scott, 1985). Seperti halnya *sawi* memanfaatkan situasi ketika *punggawa* berkolaborasi dengan kandidat tertentu untuk mendapatkan bantuan seperti sembako, subsidi solar, atau beasiswa anak. Mereka tidak menentang arahan *punggawa*, tetapi mereka

memanfaatkan hubungan tersebut untuk keuntungan keluarga. Dengan demikian, jaringan politik *punggawa* di Bababulo bukanlah struktur yang statis, melainkan sebuah arena yang dinamis tempat berbagai kepentingan saling bersilangan, bernegosiasi, dan beradaptasi dengan logika demokrasi moderen.

Kebijakan desentralisasi dan munculnya pemimpin lokal yang kuat pasca-Reformasi telah menciptakan arena politik baru di mana *punggawa* harus bernegosiasi tidak hanya dengan *sawi* mereka, tetapi juga dengan birokrasi daerah dan pemangku kepentingan lainnya, seperti yang diobservasi oleh von Benda-Beckmann & von Benda-Beckmann (2013), bahwa desentralisasi seringkali justru memunculkan bentuk-bentuk patronase lokal baru yang kompleks. Dalam konteks ini, seorang *punggawa* di Bababulo mungkin juga menjalin aliansi dengan pejabat dinas perikanan setempat untuk mengamankan akses terhadap kuota tangkap atau proyek bantuan pemerintah, yang kemudian didistribusikan kembali kepada jaringan *sawi*-nya sebagai bentuk konsolidasi kekuasaan dan balas jasa. Praktik semacam ini mengaburkan batas antara sektor publik dan privat, serta antara kekuasaan tradisional dan politik birokrasi moderen. Tekanan dari industri besar ini sering kali justru memperkuat posisi tawar *punggawa* di mata *sawi*, karena *sawi* tradisional melihat mereka sebagai pelindung dari ancaman di luar komunitas mereka. Dinamika eksternal ini, seperti yang ditunjukkan dalam studi Lucas & Warren (2013) tentang transformasi pedesaan di Indonesia, merupakan faktor kunci yang membentuk ulang relasi kuasa di tingkat lokal. Dengan demikian, jaringan politik *punggawa* di Bababulo harus dipahami sebagai suatu sistem yang cair dan responsif, yang tidak hanya dimobilisasi untuk pemilu, tetapi terus-menerus dipertautkan dan diperkuat oleh berbagai kekuatan ekonomi-politik di tingkat regional dan nasional, sekaligus menghadapi tekanan dari bawah berupa bentuk-bentuk resistensi sehari-hari dari *sawi* yang mulai menyadari nilai politis dari suara mereka.

Penelitian mengenai relasi patron-klien dalam komunitas *sawi* Indonesia telah banyak dilakukan, namun fokusnya masih didominasi oleh dimensi ekonomi dan ekologis. Miñarro dkk. (2016) yang meneliti hubungan patron-klien di Kepulauan Spermonde, menemukan bahwa ketergantungan *sawi* terhadap patron membentuk perilaku melaut dan distribusi keuntungan yang timpang. Kajian serupa oleh Roberts dkk. (2022) menunjukkan bahwa relasi patronase menentukan struktur rantai nilai perikanan dan memperkuat ketimpangan dalam akses pasar. Nurdin dan Grydehøj (2014) menambahkan dimensi tata kelola informal dengan menyoroti bagaimana patron-klien menciptakan mekanisme pengendalian sosial yang justru memfasilitasi praktik destruktif seperti penggunaan bahan peledak. Ketiga penelitian tersebut memperlihatkan kuatnya ketergantungan struktural *sawi* terhadap patron, namun belum mengulas aspek politik dari relasi ini maupun bagaimana modal sosial dan simbolik patron bertransformasi dalam konteks demokrasi lokal.

Dalam kajian politik, Haryanto (2017) menemukan keberlanjutan praktik klientelisme di komunitas *sawi* Takalar di mana patron tradisional berperan sebagai pialang suara (*vote broker*) dalam pemilihan kepala daerah. Aspinall dan Berenschot (2019) memperluas analisis tersebut dengan menegaskan bahwa jaringan patronase menjadi fondasi utama praktik politik uang di Indonesia, sementara broker lokal memainkan peran penting dalam menghubungkan kandidat dan pemilih. Meskipun keduanya berhasil memotret peran patron dalam politik elektoral, pendekatan mereka cenderung makro dan berorientasi pada struktur, dan mengabaikan dinamika mikro di tingkat komunitas, terutama bagaimana kekuasaan patron dijalankan melalui modal moral, simbolik, dan hubungan emosional yang terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari *sawi*.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan ketimpangan struktural atau mekanisme distribusi suara, studi ini berfokus pada mekanisme mikro bagaimana hubungan berbasis hutang budi, rasa malu, dan kepercayaan personal dan kepercayaan personal dijadikan alat mobilisasi politik oleh *punggawa* dan bagaimana

sawi menegosiasikan posisi mereka melalui strategi resistensi halus.

Pembahasan mencakup tiga aspek utama, yaitu: (1) Konstruksi modal dan jaringan kuasa *puggawa*; (2) Mekanisme konversi modal menuju mobilisasi politik; (3) Transformasi relasi *punggawa-sawi* dalam arena demokrasi modern. Ketiga bagian ini menekankan bagaimana relasi *punggawa-sawi* tidak lagi sekedar fenomena ekonomi, melainkan juga praktik politik yang hidup dan terus bertransformasi dalam arena demokrasi lokal.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus intrinsik untuk menyelami secara mendalam kompleksitas jaringan politik *punggawa* di Desa Bababulo, Kabupaten Majene. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling tepat untuk mengungkap makna, strategi, dan dinamika sosial yang terdapat di balik relasi kuasa dan praktik mobilisasi yang terjadi, di mana angka dan statistik tidak cukup mampu menangkap nuansanya (Creswell & Poth 2018).

Pengumpulan data di lakukan dengan wawancara mendalam dan observasi partisipasi untuk memahami bagaimana modal sosial dan simbolis dikonversi menjadi modal politik oleh parah *punggawa*. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang mencakup beberapa topik utama yaitu: persepsi terkait hubungan ekonomi dan sosial antara *punggawa* dan *sawi*, konstruksi kekuasaan yang terbentuk melalui jaringan patronase di komunitas *sawi*, dampak sosial dan politik yang dirasakan *sawi* sebagai pihak yang bergantung pada *punggawa*, serta respon dan strategi mereka dalam menghadapi dominasi serta mobilisasi politik yang dijalankan oleh *punggawa*.

Informan penelitian dipilih menggunakan *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengetahuan informan terhadap fenomena yang diteliti. Terdapat 11 informan berpartisipasi dalam penelitian ini, yang terdiri atas masing-masing seorang aktor politik, aparatur desa, dua orang *punggawa*, dan tujuh orang *sawi*, dan berusia antara 19 dan 54 tahun, sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 1** berikut ini.

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Keterangan
1.	Tasrip	48	Laki-laki	Aparat Desa
2.	Ardan Aras	41	Laki-laki	Aktor Politik
3.	Ilham	54	Laki-laki	<i>Punggawa</i>
4.	Bagas	46	Laki-laki	<i>Punggawa</i>
5.	Daud	44	Laki-laki	<i>Sawi</i>
6.	Sahrin	34	Laki-laki	<i>Sawi</i>
7.	Syukur	28	Laki-laki	<i>Sawi</i>
8.	Ismail	33	Laki-laki	<i>Sawi</i>
9.	Usman	30	Laki-laki	<i>Sawi</i>
10.	Didi	30	Laki-laki	<i>Sawi</i>
11.	Basri	19	Laki-laki	Anak <i>Sawi</i>

Analisis naratif digunakan dengan berfokus pada pemahaman proses pembentukan makna atas pengalaman sosial dan politik para aktor dalam jaringan

patronase. Seluruh hasil wawancara ditranskrip secara lengkap sesuai ucapan informan, kemudian dibaca berulang secara holistik untuk menangkap alur cerita, konteks sosial, serta posisi aktor dalam relasi *punggawa-sawi*. Setiap narasi diuraikan berdasarkan struktur peristiwa—latar, konflik, dan resolusi—guna mengidentifikasi tema-tema utama seperti kepercayaan, hutang budi, perlindungan, dan negosiasi kekuasaan. Analisis selanjutnya menautkan pengalaman individual ke dalam konteks sosial-politik yang lebih luas untuk melihat bagaimana makna dan relasi kuasa dikonstruksi serta dinegosiasikan melalui bahasa dan praktik sehari-hari.

Untuk menjaga kredibilitas dan keabsahan data, penelitian ini menerapkan dua teknik verifikasi, yaitu triangulasi dan *member check*. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai kategori informan, termasuk *punggawa*, *sawi*, dan aparat desa, guna memperoleh gambaran yang lebih utuh terhadap fenomena patronase di Bababulo. *Member check* dilakukan dengan meminta konfirmasi ulang kepada informan mengenai hasil interpretasi peneliti, agar makna yang diperoleh tetap sesuai dengan realitas sosial yang dimaksudkan.

Dari sisi etika penelitian, seluruh informan telah mendapatkan penjelasan menyeluruh mengenai tujuan, manfaat, serta prinsip kerahasiaan data sebelum kegiatan wawancara dan observasi dilakukan. Dalam pelaksanaan penelitian ini, seluruh informan terlebih dahulu diberikan penjelasan yang jelas mengenai maksud penelitian, bentuk keterlibatan mereka, serta bagaimana data yang mereka berikan akan digunakan. Peneliti memastikan bahwa setiap informan memahami bahwa partisipasi mereka bersifat sukarela dan tidak menimbulkan kewajiban apa pun. Setelah memperoleh pemahaman tersebut, barulah informan dimintai persetujuan untuk berpartisipasi, termasuk persetujuan untuk direkam selama proses wawancara. Peneliti juga menegaskan bahwa informan berhak menolak menjawab pertanyaan tertentu atau menghentikan wawancara kapan saja tanpa konsekuensi apa pun terhadap posisi sosial mereka dalam komunitas. Untuk menjaga kerahasiaan identitas, seluruh nama informan disamaraskan menggunakan *pseudonym*. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang dibagikan tidak menimbulkan risiko sosial, ekonomi, maupun politik di masa yang mendatang.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

• Konstruksi Modal dan Jaringan Kuasa *Punggawa*

Di Desa Bababulo, kekuasaan *punggawa* adalah fenomena yang rumit yang melampaui determinisme ekonomi; dominasi mereka dipertahankan melalui pengaturan strategis dan komunikasi interaktif antara berbagai jenis modal dalam jaringan patron-klien, juga dikenal sebagai *punggawa-sawi*. Pemeliharaan modal sosial adalah kekuatan utama. Ini dibangun melalui pemanfaatan ikatan kekerabatan, praktik resiprositas yang melampaui pertukaran pasar (seperti bantuan sosial dan moral), dan kontrol sentral atas informasi penting (seperti akses dan pengetahuan laut). Ini menciptakan kewajiban moral dan setia yang mengikat pihak *sawi*. Selanjutnya, pengelolaan modal sosial adalah dasar penting untuk mengubah modal ekonomi yang diperoleh dari hasil laut menjadi modal simbolis (legitimasi, prestise, dan kehormatan). Ini dicapai melalui tindakan kedermawanan atau peran sebagai figur utama dalam komunitas, yang memastikan legitimasi dan kelangsungan hegemoni *punggawa* dalam struktur masyarakat pesisir (Bourdieu, 1986).

Relasi antara *punggawa* dan *sawi* di Bababulo bekerja melalui mekanisme yang kompleks, dimana praktik ekonomi “diselimuti” oleh ikatan sosial, moral, dan politik. Dalam kerangka pemikiran Pierre Bourdieu (1986), modal tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga dapat berwujud sosial (jaringan pertukaran dan hutang budi), simbolik (kehormatan, wibawa, dan peran pelindung), serta kultural (pengetahuan lokal dan nilai

moral). Ketiga bentuk modal ini saling terkait dan berperan penting dalam mempertahankan struktur kekuasaan lokal.

Modal Sosial: Jaringan Pertukaran dan Hutang Budi

Di Desa Bababulo, temuan penelitian mengungkapkan bahwa fondasi paling kokoh dari kekuasaan seorang *punggawa* justru bukan terletak pada gudang-nya atau jumlah kapal yang dimiliki, melainkan pada jaring laba-laba modal sosial yang dia rajut dan pelihara sepanjang hidupnya. Jaringan ini hidup melalui serangkaian praktik pertukaran dan hutang budi (utang piutang, dalam istilah lokal) yang sangat halus namun memiliki daya ikat yang luar biasa. Informan Tapsir, seorang *punggawa* yang juga pengusaha, tidak pernah sekalipun menyebutkan angka ketika memberi pinjaman modal awal musim tangkap kepada *sawi*-nya. Hal ini sejalan dengan pendapat Pak Ilham selaku *punggawa* kapal menyatakan bahwa:

Kita ini kerja dilaut semua harus pakai rasa percaya, bukan kertas atau tanda tangan. Kalau ada anak buah datang pinjam uang untuk beli keperluan melaut atau perbaiki mesin bahkan ada yang datang pinjam uang untuk urusan keluarganya, saya *nda pernah* tanya kapan mau di ganti, berapa bunga, begitu tidak ada gunanya. Kalau saya begitu mereka berpikir saya tidak percaya dengan mereka. Biasanya saya bilang saja, nanti kalau ada hasil tangkapan baru kau ganti pelan-pelan.

Kalimat sederhana inilah yang sebenarnya menjadi kontrak sosial yang sangat kuat. Praktik pinjam tapi tidak ditagih dengan ketat ini menciptakan suatu ruang hutang budi yang abadi, yang membuat *sawi* merasa berutang bukan hanya berupa uang, tetapi juga rasa terima kasih dan loyalitas kepada sang *punggawa*. Mekanisme ini sejalan dengan gagasan The Gift dari Mauss (1925), yang menekankan bahwa setiap pemberian membawa tanggung jawab untuk membalas. Bantuan *punggawa* adalah "hadiyah yang mengikat" yang membentuk dan mempertahankan hubungan sosial. Bagi nelayan, "balasan" itu bisa berupa loyalitas, kepatuhan, dan keinginan untuk mengikuti arahan *punggawa* dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kerja dan politik, daripada uang. Oleh karena itu, logika pertukaran ala Mauss menjelaskan bagaimana praktik bantuan sehari-hari menjadi dasar dari hubungan patronase yang terus-menerus.

Dalam kesehariannya, jaring laba-laba ini tidak hanya berputar pada urusan perikanan, tapi juga urusan keluarga. Syukur salah satu *sawi* di Desa Bababulo mengungkapkan bahwa ketika anaknya harus dirawat di rumah sakit, Pak Ilham orang pertama yang dihubungi, bukan keluarga atau tetangga. Dengan sigapnya, mobil Pak Ilham siap menjadi ambulans dan Pak Ilham yang menalangi biaya rumah sakit terlebih dahulu. Bapak Ilham ibarat "lumbung hidup" bagi keluarga Syukur. Urusan anak sekolah, istri melahirkan, sampai urusan beres-beres kematian dalam keluarga, beliau selalu ada. Intervensi *punggawa* dalam siklus hidup para *sawi* dan keluarganya inilah yang mengukuhkan posisinya bukan sekadar pemodal, melainkan pelindung dan patron sejati.

Bagaimana jaringan ini diperkuat melalui ritual-ritual sosial harian yang tampak sepele? Warung, di ujung jalan dekat bibir pantai sebenarnya milik seorang kerabat Pak Ilham, menjadi ruang publik tak resmi tempat para *sawi* biasa nongkrong sepulang melaut. Selain membahas harga ikan, obrolan sering kali dibumbui oleh politik lokal. Dalam suasana santai inilah, tanpa instruksi langsung, informasi dan "arahan" secara halus disebarluaskan, seperti yang diungkapkan oleh Sahrin, seorang *sawi* di Desa Bababulo bahwa:

Biasanya kalau sore habis melaut, kami *ngumpul* di warung dekat pantai, *ngobrol-ngobrol* biasa, tiba-tiba ada yang bilang: "Katanya tahun depan calonnya Pak Ilham mau maju lagi, *bagusmi* kalau kita dukung juga." Ya kami iya saja, karena memang sudah seperti keluarga, dari dulu kalau ada susah, beliau yang bantu.

Jadi rasanya tidak enak kalau tidak ikut dukung, bukan karena disuruh, tapi karena tahu diri dan ingat budi.

Pernyataan "seperti keluarga" ini adalah kristalisasi dari modal sosial yang telah berhasil dikonversi menjadi ikatan emosional yang kuat. Penguatan melalui jalur kekeluargaan (*family-type relationship*) ini merupakan strategi patronase klasik yang masih sangat efektif, seperti yang diidentifikasi oleh Scott (1972) dalam masyarakat agraris, dan ternyata masih sangat relevan dalam konteks masyarakat *sawi* modern. Dengan demikian, kuasa *punggawa* di Bababulo dibangun dan direproduksi setiap hari bukan melalui ancaman atau kontrak legal, tetapi melalui rajutan halus rasa berutang budi, intervensi dalam krisis hidup, dan kehadirannya dalam ruang-ruang sosial sehari-hari yang menciptakan rasa kebersamaan dan kewajiban untuk membala budi.

Modal Simbolik: Wibawa, Wibawa, dan Peran Pelindung

Jika modal sosial adalah jaringan yang mengikat, maka modal simbolis adalah "cahaya" yang membuat jaringan itu terlihat dan diakui oleh seluruh masyarakat. Di Bababulo, kekuasaan seorang *punggawa* seperti Pak Ilham tidak akan langeng hanya dengan menjadi kreditor yang dermawan. Yang justru lebih menentukan adalah kemampuannya membangun citra dan wibawa, yang oleh Bourdieu (1991) disebut sebagai "kekuatan yang tidak terlihat" (*invisible power*) yang membuat segala tindak-tanduknya dianggap "wajar," dilegitimasi (*legitimate*), dan bahkan patut dihormati. Modal simbolis ini dimanifestasikan dalam banyak hal, mulai dari cara berpakaian, tutur kata, hingga partisipasinya dalam ruang-ruang publik. Ini berbeda dari gambaran pemodal konvensional yang hanya memikirkan untung-rugi, Pak Ilham justru kerap terlihat duduk bersama para *sawi* tua di galangan kapal, mendengarkan keluh kesah mereka dengan sabar, sambil sesekali membagikan rokok. Ia dijuluki sebagai "orang pandai dan berani." Menurut Ismail, ketika terjadi konflik antara *sawi* desa sini dan *sawi* desa sebelah, beliau yang maju di depan, bukan bersembunyi, seperti yang dijelaskannya berikut ini:

Kami sempat ribut sama *sawi* dari desa sebelah tentang batas tangkapan. Pak Ilham sudah datang ke pantai duluan. Dia dengan cepat menyatakan, bahwa: "Jangan ada yang berkelahi kalau mau bicara, kita bicara baik-baik." Namun, jika ada yang ingin angkat parang, dia juga akan maju duluan. Makanya kami semua hormat. Kalau bukan dia yang turun tangan waktu itu, mungkin sudah pecah besar itu masalah. Dia bukan cuma juragan, tapi betul-betul seperti pelindung untuk kita di sini.

Peristiwa-peristiwa semacam ini yang kemudian menjadikannya semacam "pahlawan" di tingkat lokal. Ini, secara perlahan namun pasti, mengukuhkan citranya bukan hanya sebagai pemodal, melainkan sebagai pelindung komunitas yang memiliki nyali dan kecerdasan.

Bahasa menjadi alat yang sangat penting dalam membangun modal simbolis ini. Dalam setiap interaksi, para *sawi* hampir tidak pernah memanggil nama sang *punggawa* langsung. Panggilan "Pak Haji" yang disematkan di depan namanya bukan sekadar sapaan, melainkan penanda status sosial yang terus-menerus diingatkan. Bahkan, dalam percakapan sehari-hari di warung, mereka sering kali menggunakan metafora. Ketiadaan Pak Haji diibaratkan seperti "perahu tak berkemudi," yang menggambarkan betapa sentralnya posisi patron dalam tatanan kehidupan mereka. Metafora semacam ini, muncul secara organik dari masyarakat adalah bukti bahwa kekuasaan *punggawa* telah terinternalisasi dengan baik. Mereka tidak dipandang sebagai penindas, melainkan sebagai poros yang memungkinkan kehidupan ekonomi dan sosial terus berputar. Proses membangun kekuatan semacam ini sejalan dengan konsep *symbolic power* (kekuatan simbolik) dari Bourdieu (1991) di mana kekuasaan dijalankan melalui pengakuan kolektif yang sering kali tidak disadari karena berlangsung secara gradual.

Rumah Pak Ilham yang letaknya strategis di pinggir jalan utama, dengan terasnya yang luas dan selalu terbuka untuk siapa saja, berfungsi sebagai monumen fisik dari kekuasaannya. Berbeda dengan rumah mewah berpagar tinggi yang justru menciptakan jarak, rumahnya yang terbuka justru menjadi simbol aksesibilitas dan kedekatannya dengan masyarakat sekitar, sekaligus menegaskan bahwa dia adalah orang yang cukup berpengaruh untuk tidak perlu mengunci diri dan dekat dengan masyarakat. Dalam konteks ketidakpastian hidup sebagai *sawi*, dimana hasil tangkapan tidak pernah stabil, kehadiran seorang patron sangat signifikan dan mampu menjadi “dewa penolong” di kala susah dengan memberikan rasa aman yang sangat bernilai. Dengan demikian, modal simbolis bekerja sebagai perekat yang membuat hubungan patron-klien yang pada dasarnya timpang ini terasa alamiah, diterima, dan justru dirindukan kehadirannya.

Modal Kultural: Pengetahuan Lokal dan Nilai Moral

Jika modal sosial menautkan para aktor melalui jaringan hubungan, dan modal simbolik memberi legitimasi atas posisi *punggawa*, maka modal kultural berfungsi sebagai landasan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlakukan dalam keseharian sehingga relasi patron-klien dapat bekerja secara “alamiah” dan diterima tanpa paksaan. Dalam perspektif Bourdieu (1986), modal kultural tidak hanya berupa pendidikan formal, tetapi juga mencakup, etos kerja, kebiasaan, serta nilai moral yang diinternalisasi dan diakui oleh komunitas sebagai norma bersama. Dalam perspektif Bourdieu (1986), inilah yang disebut dengan Habitus. Habitus adalah hasil dari internalisasi berkelanjutan (penyerapan) pengalaman sosial dan lingkungan hidup individu, yang kemudian dipelihara, diperkuat, dan digunakan kembali secara otomatis sebagai skema atau cetak biru untuk bertindak (Bourdieu 1986). Pengetahuan lokal mengenai laut, pola angin, musim tangkap, teknik navigasi tradisional, hingga cara memperbaiki mesin perahu sederhana adalah bentuk modal kultural yang dimiliki para *sawi* dan diwariskan secara turun-temurun. Namun pengetahuan lokal ini tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam orbit pengetahuan dan pengalaman *punggawa*. Seorang *sawi* muda, Daud, mengungkapkan:

Saya banyak belajar juga dari *punggawa*, *punggawa* itu sudah banyak pengalamannya. Saya sendiri juga baru ikut-ikut melaut masih banyak mau dipelajari bagusnya *punggawa* dan teman-teman yang selalu *ajariki*, pelajaran paling banyak itu dari *punggawa* karena dia pengalamannya sudah panjang dalam melaut.

Pernyataan Daud sebagai *sawi* muda menunjukkan bahwa modal kultural *punggawa* berupa pengalaman panjang, keahlian teknis, serta pengetahuan lokal tentang laut menjadi sumber utama pembelajaran bagi para *sawi*. Daud mengakui bahwa meskipun ia memiliki pengetahuan dasar mengenai laut dan teknik melaut, arah dan keputusan *punggawa* tetap menjadi rujukan utama. Pengetahuan *punggawa* direproduksi dan diwariskan secara turun-temurun, menciptakan pola ketergantungan yang tidak dirasakan sebagai paksaan, melainkan sebagai bagian alamiah dari kehidupan melaut. Keberadaan modal kultural membuat praktik pertukaran dan perlindungan antara *punggawa-sawi* tidak dirasakan sebagai bentuk eksloitasi, tetapi sebagai hubungan yang sesuai nilai lokal. Modal kultural ini berfungsi sebagai jembatan antara modal sosial dan simbolik mengubah jaringan pergaulan dan citra wibawa menjadi struktur kekuasaan yang terlihat alami dan tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, sebagaimana yang diungkapkan oleh Didi:

Sebenarnya bukan karena takut atau ada paksaan kami ikut *punggawa*, selain bos *punggawa* juga tempat kami belajar, tempat minta pendapat tempat kami juga minta bantuan. Kalau *punggawa* bilang kami pasti mengikuti karena yakin dia lebih tahu, tapi tetap *punggawa* juga selalu minta pendapat kami dulu.

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan *sawi* kepada *punggawa* bukanlah lahir dari rasa takut atau tekanan, melainkan dari internalisasi nilai-nilai lokal yang menempatkan *punggawa* sebagai figur pengetahuan, pelindung, dan pembimbing dalam kehidupan melaut.

Modal kultural memainkan peran kunci dalam mempertahankan relasi *punggawa-sawi* di Bababulo. Pengalaman, pengetahuan lokal, dan nilai moral yang dimiliki *punggawa* menjadi sumber otoritas yang diakui secara sukarela oleh para *sawi*. Melalui proses belajar, pembimbingan, dan perlindungan yang berlangsung sehari-hari, hubungan patron-klien tidak dirasakan sebagai paksaan, tetapi sebagai bagian alami dari adat dan cara hidup masyarakat pesisir.

- **Mekanisme Konversi Modal Menuju Mobilisasi Politik**

Dalam masyarakat *sawi* di Desa Bababulo, kekuatan *punggawa* tidak hanya bertumpu pada kepemilikan modal ekonomi, tetapi pada kemampuannya mengembangkan dan memperluas fungsi modal ekonomi, sosial, dan simbolik sehingga memperoleh makna politik dalam konteks elektoral. Relasi patron-klien yang awalnya berputar pada pertukaran kerja, akses modal, dan proteksi sosial kemudian meluas menjadi instrumen mobilisasi politik yang efektif selama momentum pemilihan umum. Dalam proses ini, loyalitas *sawi* tidak lagi dipahami sebatas hubungan kerja atau solidaritas sosial, melainkan menjadi bagian dari ekspansi kekuasaan *punggawa* ke ranah politik.

Tiga mekanisme utama yang menjadi dasar proses konversi ini adalah: *pertama*, rasa berutang budi dan utang ekonomi berubah menjadi kewajiban politik moral. *Kedua*, politik elektoral sebagai arena pertukaran yang diperluas. *Ketiga*, strategi mobilisasi dilakukan secara halus melalui cerita bersama tentang rasa takut, kewajiban, dan harapan. Ini dilakukan tanpa paksaan langsung.

Dari Utang Ekonomi ke Kewajiban Politik

Jembatan yang menghubungkan dunia ekonomi yang bersifat sehari-hari dengan ranah politik yang periodik dalam relasi *punggawa-sawi* di Bababulo dibangun dari material yang sangat kuat: "rasa berutang budi." Proses konversi ini tidak pernah tertulis, tidak pernah diumumkan, dan hampir tidak pernah dibicarakan secara eksplisit. Ia bekerja dalam ruang senyap di antara kata-kata, dalam anggukan kepala yang memahami, dan dalam ingatan kolektif akan segala bentuk pertolongan yang telah diberikan. Ketika jelang Pemilu, hutang-hutang ekonomi yang seolah-olah lunas setiap kali panen itu, ternyata hanya lunas secara finansial. Sisa hutang moralnya justru "mengendap" dan siap dimobilisasi. Sebagai seorang *punggawa*, Pak Ilham tidak perlu repot-repot mengingatkan para *sawi*-nya untuk mendukung calon yang didukungnya. Mekanismenya jauh lebih halus. Sahrin menjelaskan, bahwa ketika Pemilu mendekat Pak Ilham akan mengatakan:

Biasanya kalau sudah dekat-dekat pemilu, Pak Ilham cuma bilang: "Kita pilih pemimpin yang peduli sama rakyat kecil, yang tidak susahkan kita *sawi*" tidak pernah disebut nama calonnya, tapi kita semua sudah paham maksudnya ke siapa. Ya, kita anggap itu tanda terima kasih saja, kan selama ini dia juga bantu kita waktu susah.

Kalimat itu, yang sekilas terlihat seperti obrolan biasa tentang kepentingan bersama, sebenarnya adalah "kode politik" yang mengandung pesan tersirat. Pesannya jelas: pemimpin yang "dukung rakyat kecil" itu adalah calon yang didukung oleh Pak Ilham sendiri, dan mendukung calon itu adalah bentuk "balas budi" karena selama ini dia tidak mempersulit kehidupan mereka sebagai *sawi*.

Konversi ini menjadi mungkin karena adanya tatanan moral ekonomi yang telah mapan, sebagaimana yang pernah digagas oleh Thompson (1971) untuk menjelaskan

protes sosial di Inggris abad 18, yang ternyata masih relevan dalam konteks kekinian. Dalam tatanan ini, hubungan *punggawa-sawi* tidak dilihat sebagai hubungan kontraktual murni, melainkan sebagai hubungan timbal-balik yang diatur oleh norma-norma moral tentang keadilan dan kewajiban. Seorang *punggawa* diharapkan untuk bertindak sebagai pelindung, dan sebagai gantinya, seorang *sawi* memberikan loyalitasnya yang dalam konteks modern, mencakup loyalitas politik. Ketika seorang *punggawa* dianggap telah memenuhi kewajibannya sebagai patron yang baik, maka adalah sebuah pelanggaran moral bagi *sawi* untuk tidak membalaunya dengan dukungan politik. Dalam kaitan dengan ini, Bagas selaku *punggawa* mempertegas hal tersebut dengan mengatakan, bahwa:

Kalau kami sesama nelayan itu saling tolong menolong, tidak hanya *sawi* yang butuh bantuan kami juga butuh bantuan *sawi* (*punggawa*) jadi bukan soal siapa *punggawa* siapa *sawi* atau soal utang piutang yang selesai kalau sudah lunas, kami (*punggawa*, *sawi*) ini keluarga sudah seharusnya saling membantu.

Ini menggambarkan betapa dalamnya ikatan moral dan kekeluargaan. Ikatan moral dan kekeluargaan inilah yang menjadi penegak hukum internal yang jauh lebih efektif daripada ancaman atau iming-iming uang semata. Namun, proses konversi ini tidak berjalan satu arah dan terjadi begitu saja. Ia adalah sebuah permainan interpretasi yang rumit. Para *sawi* juga bukan pihak yang polos, mereka memiliki pembacaan mereka sendiri tentang seberapa besar hutang mereka dan seberapa wajar pembayaran politik yang diminta. Seorang *sawi* yang merasa hanya menerima pinjaman kecil mungkin akan merasa kewajibannya tidak sebesar *sawi* lain yang anaknya disekolahkan oleh sang *punggawa*. Di sinilah "negosiasi halus," yang dibahas pada poin sebelumnya kembali terjadi.

Politik Elektoral sebagai Arena Pertukaran yang Diperluas

Ketika masa tenang *sawi* berganti dengan hiruk-pikuk kampanye pemilu, seluruh relasi *punggawa-sawi* di Bababulo memasuki fase yang berbeda. Arena yang biasanya didominasi oleh transaksi ekonomi dan jaring pengaman sosial ini tiba-tiba bertransformasi menjadi sebuah pasar pertukaran politik yang sangat dinamis. Dalam pasar ini, suara para *sawi* dan keluarganya menjadi komoditas berharga, dan jaringan *punggawa* yang sudah terbangun bertahun-tahun berfungsi sebagai infrastruktur distribusi yang sangat efektif. Namun, yang unik di sini adalah, pertukaran yang terjadi tidak secara langsung seperti "uang kontan ditukar suara." Temuan di lapangan justru menunjukkan sebuah mekanisme yang jauh lebih kompleks, di mana politik elektoral menjadi momen untuk memperluas dan memperdalam lingkaran pertukaran yang sudah ada, sekaligus mengonsolidasikan posisi sang *punggawa* dalam hierarki politik yang lebih luas.

Salah satu temuan kunci adalah bagaimana seorang *punggawa* seperti Pak Ilham bertindak sebagai penghubung vital atau *broker* antara calon politisi di tingkat kabupaten dengan basis massa di akar rumput. Seorang calon bupati, misalnya, tidak mungkin menjangkau dan membangun kepercayaan setiap kepala keluarga di pelosok dalam waktu singkat. Di sinilah nilai seorang *punggawa* muncul. Dia tidak hanya menjanjikan suara dari para *sawi*-nya, tetapi yang lebih penting, dia menjamin keterpercayaan dan kualitas suara tersebut. Usman sebagai *sawi* memperjelas hal ini dengan menyatakan, bahwa: "Ketika saya dipertemukan dengan calon oleh Pak Haji, rasanya berbeda daripada ketika didatangi orang asing dari tim sukses. Kita percaya karena kita percaya sama Pak Haji. Kalau dia bilang calon ini baik untuk kita, ya kita percaya saja."

Kepercayaan (*trust*) yang telah lama diinvestasikan oleh *punggawa* dalam relasi sehari-hari inilah yang kemudian dengan mudah dialihkan (*transferable*) kepada kandidat yang didukungnya. Proses ini membuat mobilisasi menjadi sangat efisien dan murah bagi sang kandidat karena dia tidak perlu membangun kepercayaan dari nol,

melainkan hanya perlu menyewa atau bekerja sama dengan *punggawa* yang sudah memiliki stok kepercayaan melimpah.

Namun, arena yang diperluas ini juga membawa risiko baru. Para *sawi* menjadi semakin sadar bahwa suara mereka bernilai. Seorang *sawi* muda, Tapsir, bercerita dengan lebih kalkulatif, bahwa: "Sekarang ini, kalau ada yang *nawarin* kaos atau sembako dari kubu lain, ya kita terima. Tapi suara di bilik sana, rahasia. Tergantung siapa yang lebih berjasa buat kita."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam pasar politik yang semakin terbuka, monopoli loyalitas oleh satu *punggawa* mulai mendapatkan pesaing. Politik elektoral membuka keran informasi dan alternatif, memungkinkan *sawi* membandingkan tawaran dari berbagai patron. Situasi ini memaksa *punggawa* tradisional seperti Pak Ihham untuk tidak lagi mengandalkan hutang budi masa lalu semata. Mereka harus terus-menerus mereproduksi dan memperbarui hubungan pertukaran, menunjukkan bahwa dalam demokrasi yang semakin kompetitif, bahkan patron yang kuat pun harus mempertahankan pasar-nya dari rival yang terus bermunculan.

Pada titik inilah meluasnya arena sosial *punggawa* dimana posisi *punggawa* tidak saja semakin terinstitusionalisasi sebagai elite lokal yang berpengaruh lintas sektor, tetapi juga menghadapi tekanan baru karena *sawi* kini memiliki opsi lain dan mampu menilai manfaat hubungan secara lebih rasional. Ekspansi arena sosial ini memperbesar kapasitas kontrol *punggawa*. Namun pada saat yang sama membuka peluang tergerusnya relasi sosial tradisional ketika ikatan yang dulu berbasis kedekatan moral berubah menjadi hubungan yang lebih temporal dan transaksional. Dengan demikian, politik elektoral bukan hanya memperluas peran *punggawa* dalam arena politik, tetapi juga menjadi titik kritis yang menentukan apakah struktur patronase tradisional masih mampu bertahan dalam logika pertukaran di abad modern ini.

Strategi Mobilisasi: Antara Tekanan Halus dan Imbalan Sosial

Pada puncak siklus politik elektoral, mekanisme mobilisasi suara yang dijalankan oleh *punggawa* di Bababulo mengkristal menjadi sebuah pertunjukan sosial yang rumit, di mana paksaan dan bujukan berbaur menjadi satu dalam bentuk yang sering kali samar. Temuan penelitian ini mengungkap bahwa strategi yang digunakan jauh lebih canggih daripada sekadar *iming-iming* uang atau ancaman pemutusan hubungan ekonomi. Justru, strategi yang paling efektif adalah yang mampu menjaga wajah kedua belah pihak, sang *punggawa* tetap terlihat sebagai patron yang bermartabat, sementara para *sawi* tidak merasa seperti diperjualbelikan, melainkan sedang menjalankan kewajiban sosialnya. Strategi lain yang diamati adalah mobilisasi melalui isu ketakutan dan ketidakpastian. Dalam obrolan-obrolan di warung atau saat menunggu ikan datang di pantai, para *punggawa* dan anak buahnya akan menyebarkan "narasi halus" tentang ancaman yang akan datang jika calon yang tidak mereka dukung yang menang. Daud, selaku *sawi* di Desa Bababulo, menyatakan bahwa: "Dengar-dengar, kalau calon lain yang menang, dia mau perketat izin tangkap ikan, nanti kita tidak bisa cari ikan sembarang," dan "Katanya dia dekat dengan perusahaan besar, nanti laut kita akan dikapling-kapling."

Isu-isu seperti ini, meski sulit diverifikasi, sangat efektif karena menyentuh langsung kecemasan eksistensial para *sawi*. Ketakutan akan kehilangan mata pencaharian adalah senjata yang jauh lebih ampuh daripada janji akan hadiah. Dengan menciptakan musuh bersama yang abstrak, sang *punggawa* tidak hanya memobilisasi dukungan, tetapi juga mengkonsolidasikan posisinya sebagai satu-satunya pelindung yang dapat diandalkan di tengah ancaman tersebut. Taktik ini sesuai dengan logika yang diidentifikasi oleh Törnquist (2013) bahwa dalam masyarakat dengan institusi yang lemah, politik identitas dan ketakutan sering kali dimanfaatkan untuk menggalang dukungan.

Namun, mungkin strategi yang paling kuat justru adalah yang tampaknya tidak terlihat sama sekali: membangun ekspektasi tanpa perlu berjanji. Tidak satupun *sawi* yang bisa menyebutkan bahwa Pak Haji Ilham secara gamblang berjanji membangun sesuatu yang spesifik sebagai imbalan atas suara mereka. Yang ada adalah harapan. Sahrin selaku *sawi* di Desa Bababulo, misalnya, menyatakan, bahwa:

Kita pilih orang yang dia suruh pilih, ya berharap nanti kalau menang, perhatiannya ke *sawi* di sini lebih besar soalnya kalau bukan dari beliau yang urus, siapa lagi? Dari dulu kalau susah, dia juga yang bantu. Jadi kalau sekarang dia minta dukungan, wajar saja kita ikut. Harapannya, kalau calonnya jadi, mungkin bantuan buat *sawi* bisa lebih lancar.

Ekspektasi kolektif ini tercipta karena sang *punggawa* telah membangun rekam jejak sebagai "pemberi" yang konsisten. Logika di baliknya sederhana: jika dia saja yang bukan pejabat sudah begitu baik, maka bayangkan jika calonnya yang menjadi pejabat; pastilah kebaikan itu akan berlipat ganda. Dengan demikian, mobilisasi berhasil tanpa sebuah kontrak politik eksplisit. Ia bergantung pada ekologi harapan yang telah ditanam dan dipupuk selama ini.

- **Transformasi Relasi *Punggawa-Sawi* Dalam Arena Demokrasi Modern**

Lanskap politik yang berubah di Desa Bababulo menunjukkan bagaimana relasi patron-klien antara *punggawa* dan *sawi* berubah dalam demokrasi elektoral kontemporer. Pada masa lalu, hubungan tersebut bergantung pada fondasi moral dan ekonomi yang cukup kuat. Namun, saat ini, dinamika politik lokal menimbulkan tekanan baru yang menuntut perubahan. Karena logika pasar politik yang kompetitif, di mana suara menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan, tradisi tradisional yang dulunya bergantung pada hutang budi dan solidaritas sosial harus berubah.

Section ini membahas tiga komponen proses transformasi: *pertama*, disrupsi dan adaptasi di tengah komodifikasi suara; *kedua*, *punggawa* sebagai *vote broker* dalam jaringan politik yang lebih luas; *ketiga*, masa depan patronase dalam komunitas *sawi* moderen.

Disrupsi dan Adaptasi di Tengah Komodifikasi Suara

Lanskap politik tradisional di Bababulo, yang lama dirajai oleh *punggawa* seperti Pak Ilham, kini mulai digoyang oleh gelombang disrupsi yang tak terelakkan, yakni: komodifikasi suara yang masif dan semakin vulgar. Jika sebelumnya pertukaran politik terbungkus rapi dalam balutan hutang budi dan kewajiban moral, maka gelombang pemilihan umum belakangan ini menghadirkan pemain-pemain baru, biasanya tim sukses kandidat yang didanai dengan baik yang memperlakukan suara sebagai barang dagangan biasa yang bisa dibeli dengan uang tunai, sembako, atau kaos. Fenomena ini menciptakan apa yang oleh para *sawi* sebut sebagai "musim panen raya," di mana suara mereka tiba-tiba memiliki banyak pembeli. Didi menyatakan pendapatnya terkait ini, bahwa: "Sekarang ini, satu orang bisa dapat bingkisan dari tiga empat calon berbeda. Kaosnya itu sampai menumpuk di rumah." Ini menggambarkan betapa maraknya praktik transaksional langsung ini. Situasi hiper-kompetitif ini, sebagaimana diamati oleh Aspinall (2014) dalam konteks Pemilu Indonesia secara umum, telah mendorong inflasi harga suara dan sekaligus mengikis nilai dari "mata uang" lama yang selama ini digunakan *punggawa*, yaitu hutang budi.

Dalam menghadapi disrupsi ini, para *punggawa* tradisional tidak tinggal diam. Di satu sisi, mereka mencoba memperkuat narasi ancaman terhadap gempuran "orang luar" ini. Dalam obrolan-obrolannya dengan para *sawi*, Pak Ilham dan sesama anggotanya kerap menyebut para pendatang dari tim sukses sebagai "lintah darat" yang hanya datang sesaat dan akan pergi setelah suara terambil, berbeda dengan mereka yang hidup dan mencari makan bersama para *sawi*. Narasi ini berusaha membedakan

dengan tajam antara pertukaran jangka panjang yang berbasis hubungan (*relational*) dengan transaksi jangka pendek yang transaksional murni. Di sisi lain, mereka juga terpaksa ikut masuk ke dalam permainan uang yang awalnya bukan arena utama mereka. Seorang yang informan dekat Pak Ilham, Usman selaku *sawi* di Desa Bababulo mengaku bahwa pada Pemilu terakhir, dana yang dikucurkan untuk konsumsi dan operasional para *sawi* dan kader di tingkat bawah jauh lebih besar daripada sebelumnya. Ia menyatakan bahwa: "Tidak bisa tidak, kalau kita cuma andalkan rasa malu sama hutang budi, tapi tetangganya dikasih uang sama kubu lain, ya bisa luntur, lari juga." Ini menunjukkan sebuah paradoks: untuk mempertahankan pengaruhnya yang berbasis hubungan non-material, seorang *punggawa* justru harus mengeluarkan modal material yang tidak sedikit.

Strategi lainnya adalah diversifikasi jaringan. Seorang *punggawa* yang cerdik tidak akan menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Ada indikasi bahwa beberapa *punggawa* di Bababula melakukan apa yang dalam istilah praktisi politik disebut sebagai "membagi perintah" (*split voting command*). Artinya, *punggawa* mungkin secara terbuka mendukung satu kandidat tertentu untuk memenuhi kewajiban politiknya kepada patron di tingkat atas, tetapi diam-diam mengizinkan atau bahkan memfasilitasi para *sawinya* untuk menerima bantuan dari kandidat lain yang dianggapnya juga memiliki peluang menang. Strategi ini berfungsi sebagai lindung nilai politik (*political hedge*). Tujuannya adalah agar siapa yang menang nanti, sang *punggawa* tetap memiliki akses ke kekuasaan dan bisa menjaga kepentingan ekonominya.

Punggawa Sebagai Vote Broker Dalam Jaringan Politik yang Lebih Luas

Transformasi peran *punggawa* yang paling signifikan dalam era demokrasi elektoral adalah naiknya mereka menjadi pialang suara atau *vote broker* yang menghubungkan dunia *sawi* Bababulo dengan jaringan politik yang jauh lebih luas dan kompleks di tingkat kabupaten bahkan provinsi. Jika dahulu pengaruh seorang *punggawa* mungkin hanya sejajar dengan jangkauan suara langkahnya di sekitar galangan, kini pengaruh itu merambah ke ruang-ruang rapat ber-AC di kantor bupati dan markas partai politik. Temuan penelitian mengungkap bahwa figur seperti Pak Ilham tidak lagi sekadar menjadi ujung tombak mobilisasi, melainkan telah menjadi mitra strategis yang dicari oleh para politisi untuk membukukan kemenangan di daerah basis *sawi*. Proses menjadi *broker* yang kredibel ini tidak instan. Ia dibangun di atas akumulasi modal sosial dan reputasi yang telah dikumpulkan sang *punggawa* selama puluhan tahun. Seorang calon legislatif Arda Aras menjelaskan kalkulasinya, bahwa: "Saya mendekati Pak Ilham karena dia punya *track record* yang bagus. Janjinya satu, realisasinya bisa seratus. Kalau dia bilang bisa mengamankan 200 suara dari jaringan *sawi*-nya, itu bukan angka omong kosong. Itu nyata, jadi risikonya kecil bagi saya."

Seorang *punggawa* yang mapan seperti Pak Ilham telah menjadi aset berisiko rendah bagi para politisi karena kemampuannya untuk menyediakan suara berkualitas, yaitu suara yang benar-benar terkumpul karena loyalitas, bukan sekadar dibeli dan mudah berubah. Nilai seorang *punggawa* sebagai *broker* sangat bergantung pada sejarah keterpercayaannya dalam memenuhi kuota suara yang dijanjikan kepada kandidat pada pemilu-pemilu sebelumnya.

Sebagai imbalan atas jasa *brokering*-nya, sang *punggawa* tidak hanya menerima imbalan material yang bersifat *incidental*, tapi yang lebih berharga adalah akses politik berjangka panjang yang diperolehnya. Pak Tasrip, seorang staf pemerintahan desa, menuturkan, bahwa:

Setelah pemilu sukses, biasanya sang *punggawa* akan memiliki akses langsung ke sang bupati atau kepala dinas. Teleponnya akan diangkat. Kalau ada urusan perizinan tambahan kapal atau ingin mengakses proyek bantuan alat tangkap dari Dinas Perikanan, jalurnya akan dimudahkan.

Akses ini adalah mata uang politik yang sangat berharga. Ia memungkinkan sang *punggawa* untuk memperkuat posisi ekonominya yang pada gilirannya memberikan lebih banyak lagi sumber daya kepada para *sawi*-nya, sehingga siklus patronase semakin dikokohkan. Dengan demikian, peran sebagai *vote broker* bukanlah akhir, melainkan sebuah jembatan untuk mengakumulasi lebih banyak modal ekonomi, sosial, dan politik, yang akan digunakan untuk mempertahankan hegemoninya di tingkat lokal.

Namun, masuknya para *punggawa* ke dalam jaringan politik yang lebih luas ini juga membawa konsekuensi. Mereka kini harus tunduk pada logika dan disiplin partai politik yang kadang-kadang berbenturan dengan kepentingan langsung para *sawi*-nya. Misalnya, seorang *punggawa* mungkin diharuskan untuk mendukung kebijakan tertentu yang menguntungkan pengusaha besar di sektor perikanan, yang justru bisa bersaing dengan *sawi* tradisional. Situasi ini menempatkan mereka dalam konflik kepentingan yang pelik: setia pada basis yang menjadi sumber kekuatannya, atau patuh pada patron politik di tingkat atas yang menjamin akses dan kekuasaannya. Dinamika ini menunjukkan bahwa menjadi *vote broker* adalah sebuah "permainan yang berisiko." Di satu sisi, ini memperluas pengaruh *punggawa*; di sisi lain, ini juga mengikat *punggawa* dalam jaringan yang lebih besar yang dapat mengikis otonomi dan bahkan bertentangan dengan kepentingan komunitas akar rumput yang selama ini diwakili oleh *punggawa*.

Masa Depan Patronase Dalam Komunitas Sawi Modern

Memproyeksikan masa depan relasi patronase dalam komunitas *sawi* di Bababulo mengharuskan kita untuk meninggalkan analisis dikotomis, yang memandangnya akan punah atau tetap abadi. Sebaliknya, temuan di lapangan mengarah pada sebuah kesimpulan yang lebih nuansa: jaringan patronase *punggawa-sawi* tidak akan lenyap, tetapi akan terus mengalami transformasi bentuk dan ekspresinya, beradaptasi dengan tekanan modernisasi dari luar dan perubahan kesadaran dari dalam. Salah satu tekanan terbesar datang dari meningkatnya literasi politik dan akses informasi di kalangan generasi muda *sawi*. Anak-anak para *sawi* seperti Basri, yang merupakan lulusan SMA dan aktif mengonsumsi media sosial, mulai mempertanyakan legitimasi hubungan yang dijalani orang tua mereka, sebagaimana ditegaskannya, bahwa: "Saya lihat Bapak saya seperti diatur-atur saja. Kerja keras, dapat hasil tangkap yang cukup, tapi hidupnya tidak juga bagus-bagus. Saya tidak mau seperti itu. Kalau ada Pilkada, saya pilih berdasarkan programnya, bukan karena suruhan orang." Meskipun pengaruh *punggawa* masih sangat kuat, suara-suara kritis seperti ini adalah bibit-bibit erosi jangka panjang yang perlahan-lahan akan menggerogoti fondasi patronase yang berbasis pada ketundukan dan penerimaan nasib.

Dengan demikian, masa depan patronase di komunitas *sawi* modern adalah sebuah kondisi yang kompleks. Pola-pola lama yang berbasis hutang budi dan kewajiban moral akan tetap hidup, terutama di kalangan generasi tua, tetapi akan dipangkas oleh sikap kalkulatif generasi muda. Pada saat yang sama, para *punggawa* akan terus beradaptasi dengan menyelaraskan kepentingan mereka dengan logika pasar dan demokrasi elektoral. Pertanyaannya bukan lagi "apakah patronase akan bertahan?" melainkan "seperti apakah patronase akan bertahan, dan bagaimana dampaknya terhadap keadilan sosial dan kemandirian *sawi*?" Masa depan relasi kuasa di Bababulo akan ditentukan oleh tarik-ulur antara kekuatan transformasi dari dalam komunitas dan kelincahan adaptasi dari para elit lokalnya, dalam sebuah ruang politik yang terus berevolusi mengikuti zaman.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Relasi *punggawa-sawi* di Desa Bababulo menunjukkan bahwa sistem patronase tradisional tidak lenyap di tengah modernisasi politik, melainkan bertransformasi menjadi jaringan kekuasaan yang kompleks dan adaptif. Kekuasaan *punggawa* tidak hanya bersumber dari modal ekonomi, tetapi juga dari kemampuan mengelola dan

mengonversi modal sosial, simbolik, dan kultural. Melalui jaringan kepercayaan, hutang budi, serta citra moral sebagai pelindung, *punggawa* berhasil mempertahankan legitimasi sosial dan mengubahnya menjadi modal politik yang efektif. Dalam praktiknya, loyalitas *sawi* tidak dibangun oleh kontrak formal, tetapi oleh ikatan moral dan norma budaya seperti rasa malu (*siri'*) dan kewajiban membala jasa, yang membuat hubungan patron-klien ini terasa wajar dan bermakna secara sosial.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa *sawi* bukan aktor yang sepenuhnya pasif. Di balik ketergantungan ekonomi dan moral, terdapat ruang negosiasi dan strategi adaptif yang dijalankan secara halus. Melalui tindakan seperti “pura-pura lupa” dalam penjualan hasil tangkapan atau memanfaatkan momen politik elektoral untuk menegosiasikan bantuan dan akses sumber daya, *sawi* menunjukkan agensi dan kemampuan berstrategi dalam batas-batas struktur patronase. Ruang negosiasi ini paling tampak pada periode pemilu, ketika *punggawa* memobilisasi loyalitas sosial dan moral menjadi dukungan politik, sementara *sawi* menggunakan suara mereka sebagai alat tawar yang jarang dimiliki dalam keseharian. Dengan demikian, hubungan antara *punggawa* dan *sawi* merupakan arena yang dinamis diwarnai oleh kepatuhan dan ketergantungan tetapi juga strategi adaptif dan resistensi tersembunyi.

Transformasi paling signifikan terlihat pada peran *punggawa* sebagai *vote broker* yang menghubungkan jaringan lokal *sawi* dengan kekuatan politik di tingkat kabupaten. Fungsi baru ini memperkuat posisi sosial dan ekonomi mereka, namun sekaligus menimbulkan potensi konflik kepentingan antara kepentingan komunitas *sawi* dan kepentingan politik partai. Fenomena ini menegaskan bahwa patronase di Bababulo tidak hilang, tetapi beradaptasi dengan logika demokrasi elektoral yang semakin transaksional. Sistem ini tetap berakar pada relasi moral dan kultural yang melandasi solidaritas komunitas *sawi*, tetapi sekaligus beroperasi dalam rasionalitas politik modern. Oleh karena itu, patronase di komunitas *sawi* Bababulo harus dipahami sebagai sistem kekuasaan yang cair memadukan moralitas tradisional dengan kalkulasi politik pragmatis.

Implikasi dari temuan ini menegaskan pentingnya memperkuat kehadiran negara dan lembaga ekonomi lokal yang mandiri, seperti koperasi *sawi* dan akses terhadap kredit lunak, agar ketergantungan struktural terhadap *punggawa* dapat dikurangi. Upaya pemberdayaan yang sensitif terhadap budaya lokal perlu dikembangkan agar nilai-nilai moral yang positif — seperti solidaritas dan tanggung jawab sosial — tetap terpelihara, sementara bentuk-bentuk ketergantungan yang mengekang dapat diminimalkan. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa relasi patronase di Bababulo bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan mekanisme sosial-politik yang terus berevolusi, menyesuaikan diri dengan tuntutan ekonomi dan demokrasi lokal yang terus berubah.

Acknowledgements

Peneliti berterima kasih kepada seluruh informan atas informasi yang mereka berikan, yang telah diolah menjadi data dan dipublikasikan dalam artikel ini.

Conflicts of Interest

Tidak ada konflik kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Arifin, A. (2022). *Kayanya Laut, Miskinnya Nelayan : Sebuah Paradoks di Jagad Maritim*. Kota: Unhas Press.
- Aspinall, E. (2014). "Parliament and Patronage." *Journal of Democracy*, 25(1):96–110, <https://www.journalofdemocracy.org/articles/indonesias-2014-elections-parliament-and-patronage>, diakses tanggal 17 Juli 2025.

- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Bourdieu, P. (1986). "The Forms of Capital" dalam J. Richardson (ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. Kota: Greenwood, 241–258.
- Bourdieu, P. (1991). *Language and Symbolic Power*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Braun, V. & Clarke, V. (2006). "Using Thematic Analysis in Psychology." *Qualitative Research in Psychology*, 3(2):77–101, <https://doi.org/10.1177/1478088706qp063oa>, diakses tanggal 18 Juli 2025.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (edisi IV.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Haryanto. (2017). "Adaptation and Continuities in Clientelism in a Fishing Community in Takalar, South Sulawesi." *Contemporary Southeast Asia*, 39(3):511–53, <https://doi.org/10.1355/cs39-3f>, diakses tanggal 7 September 2025.
- Lucas, A. & Warren, C. (2013). *Land for the People: The State and Agrarian Conflict in Indonesia*. Athens, OH: Ohio University Press.
- Mauss, M. (1925). *The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies*. Abingdon, Oxfordshire: Routledge.
- Mengge, A. (2019). "Struktur Ketimpangan Sosial Masyarakat Nelayan Tradisional." *Jurnal Masyarakat Pesisir*, 4(2):101–115, https://ijhss.thebrpi.org/journals/Vol_9_No_2_February_2019/14.pdf diakses tanggal 25 Juni 2025.
- Miñarro, S., Navarrete Forero, G., Reuter, H., & van Putten, I. E. (2016). The Role of Patron–Client Relations on the Fishing Behaviour of Artisanal Fishermen in the Spermonde Archipelago (Indonesia). *Marine Policy*, 69:73–83. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2016.04.006>
- Nurdin, N. & Grydehøj, A. (2014). Informal governance through patron-client relationships and destructive fishing in the Spermonde Archipelago, Indonesia. *Journal of Marine and Island Cultures*, 3(2):54–59, <https://doi.org/10.1016/j.jimic.2014.11.003>, diakses tanggal 25 Juni 2025.
- Pelras, C. (1996). *The Bugis*. Oxford: Blackwell Publishers.
- Roberts, N., Mengge, B., Utina, M. R., Muhatar, F., Anugerah, A., Icwardanhi, A., Zulkifli, R. M., & Humphries, A. (2022). "Patron–client Relationships Shape Value Chains in an Indonesian Island-Based Fisheries System." *Marine Policy*, 143, 105142, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105142>, diakses tanggal 17 Juli 2025.
- Scott, J. C. (1985). *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven and London: Yale University Press.
- Scott, J. C. (1972). "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia." *The American Political Science Review*, 66(1):91–113, <https://doi.org/10.2307/1959280>, diakses tanggal 17 Juli 2025.
- Thompson, E. P. (1971). "The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century. Past & Present." *Exford Academic* (1):76–136, <https://doi.org/10.1093/past/50.1.76>, diakses tanggal 25 Juli 2025.

- Von Benda-Beckmann, F., & von Benda-Beckmann, K. (2013). *Political and Legal Transformations in an Indonesian Polity: The Nagari from Colonisation to Decentralisation*. Cambridge: University Press.
- Törnquist, O. (2013). *Assessing Dynamics of Democratisation: Transformative Politics, New Institutions, and the Case of Indonesia*. London: Palgrave Macmillan.